KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Puan Maharani mencetak sejarah
Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 16-17



Puan Maharani Mencetak Sejarah

Selasa, awal bulan ini, 1 Oktober 2019, dalam Rapat Paripurna DPR ke-2, lahir sejarah baru dalam dunia politik Indonesia. Puan Maharani (46), menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua setelah 74 tahun keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Penulis beruntung menyaksikan secara langsung momentum bersejarah itu. Tepat pukul 20.01 WIB, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali memandu pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPR periode 2019–2024 tersebut.

Puan, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah V, dilantik bersama empat wakil Ketua DPR lainnya. Mereka adalah Azis Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar Dapil Lampung II), Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Partai Gerindra Dapil Banten III), Rachmad Gobel (Fraksi Nasdem Dapil Gorontalo), dan Muhaimin Iskandar (Fraksi PKB Dapil Jawa Timur VIII).



TRIMEDYA PANJAITAN

Trah Soekarno

Puan Maharani seolah melanjutkan tradisi serba pertama dalam trah politik Soekarno. Proklamator kemerdekaan Indonesia tersebut menjadi presiden pertama RI. Putrinya, Megawati Soekarnoputri, menjadi presiden perempuan pertama RI. Dan kini cucu Soekarno menjadi ketua DPR perempuan pertama di negeri ini.

Puan merupakan putri dari Megawati Soekarnoputri dan Taufiq Kiemas. Secara genetis, dalam tubuhnya mengalir darah Soekarno. Puan adalah cucu biologis dan ideologis dari Soekarno. Dalam banyak kesempatan, Puan kerap menyampaikan pemikiran dan ide-ide Soekarno, kakeknya itu.

Persinggungannya dengan dunia politik dimulai sejak SMP, ketika ibunya mulai aktif kembali di dunia politik. Puan menyaksikan langsung ketika Megawati dicegah rezim Orde Baru untuk masuk dalam struktur Partai Demokrasi Indonesia (PDI), hingga kemudian membentuk PDI Perjuangan dan menjadi ketua umum hingga sekarang.

Kehidupan yang dekat dengan politik itu menjadi berkah bagi Puan. Ia kaya dengan pengalaman empiris di dunia politik. Ia terlibat secara langsung dalam pembelajaran berpolitik secara genetis dari ibunya. Ia memiliki mentor politik yaitu kedua orang tuanya, Megawati dan mendiang Taufiq Kiemas.

Puan terjun ke politik pada Pemilu 2009 sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan dari Dapil Jawa Tengah V, dan berhasil meraih suara terbanyak kedua di tingkat nasional dengan 242.504 suara. Pada Pemilu 2014, ia kembali juara kedua tingkat nasional dengan perolehan 369.927 suara. Namun, ia tidak lama di parlemen karena diangkat Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pada Pemilu Legislatif 2019 yang digelar serentak dengan pemilu presiden, Puan meraih suara terbanyak pertama secara nasional dengan perolehan 404.034 suara. Dengan demikian, secara moral-politik dan hukum, ia memang layak terpilih menjadi ketua DPR RI. Ia anggota DPR RI dengan perolehan suara terbanyak nasional dan partainya, PDI Perjuangan, adalah pemenang pemilu.

Pemilihan pimpinan DPR RI periode sekarang berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Biasanya, sebelumnya pimpinan DPR dipilih dengan sistem paket dari fraksi fraksi, kemudian ditakukan voting. Sekarang ditentukan oleh hasil pemilu. Menurut Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang sudah direvisi, pimpinan DPR berjumlah lima orang berasal dari partai politik peringkat lima besar dalam Pemilu 2019. Karena itu, ketua dan wakil ketua DPR ditentukan secara internal oleh lima fraksi yang memiliki kursi terbanyak, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem.

Harapan dan Tantangan

Selama ini DPR menjadi lembaga negara yang kerap disorot kinerjanya oleh semua elemen masyarakat. Ini wajar karena kami diangkat untuk mewakili kepentingan rakyat. Bukan hanya komentar dan kritik, tapi gelombang unjuk rasa datang bertubi-tubi datang ke Kompleks Parlemen, Senayan, selama dua pekan terakhir, menjelang berakhirnya Periode DPR 2014–2019.

Bersambung ke halaman 17

Puan... sambungan dari hal 16

Para pengunjuk rasa yang terdiri mahasiswa, pelajar, dan masyarakat itu menolak sejumlah produk legislasi dan hasil kerja DPR. Sejumlah penolakan disuarakan, mulai Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan empat RUU lainnya, UU Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi (UU KPK), hingga pemilihan pimpinan KPK yang baru.

> **Kehidupan yang dekat dengan politik itu menjadi berkah bagi Puan. Ia kaya dengan pengalaman empiris di dunia politik. Ia terlibat secara langsung dalam pembelajaran berpolitik secara genetis dari ibunya. Ia memiliki mentor politik yaitu kedua orang tuanya, Megawati dan mendiang Taufiq Kiemas.**

RUU-RUU tersebut akhirnya ditunda pengesahannya.

Penilaian dari masyarakat banyak yang bernada miring kepada parlemen. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), misalnya, menilai kinerja DPR di bidang legislasi buruk dari segi kuantitas maupun kualitas. Formappi juga menilai politik legislasi DPR membela elit, fungsi anggaran tidak prorakyat, pengawasan tak bertaring, dan performa lembaga merana.

Penulis sendiri mengakui produktivitas DPR di bidang legislasi kurang *mencer*. Total RUU yang disahkan DPR periode 2014–2019 hanya 84 buah, kalah dari DPR periode 2009–2014 yang mengesahkan total 125 RUU. Sementara dalam Prolegnas 2015–2019 terdapat 189 RUU Prolegnas dan 37 RUU Prolegnas Komulatif.

Tapi, di tengah sorotan dan kritikan itu, DPR periode lalu telah mencoba bekerja keras melakukan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, legislasi, dan anggaran. Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019, 16 Agustus 2019, menyampaikan apresiasi atas kinerja DPR yang telah bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah. Di bidang anggaran, misalnya, DPR telah menyetujui alokasi Dana Desa sebesar Rp 70 triliun pada 2019 yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.

Masyarakat menaruh harapan besar pada wakil rakyatnya di parlemen agar bisa menjadi saluran aspirasi mereka. Kinerja parlemen periode lalu harus menjadi bahan evaluasi bagi kami bekerja lebih giat. Tantangan meningkatkan kinerja parlemen itu berada di pundak Ketua DPR Puan Maharani dan empat wakil ketua lainnya, serta 570 anggota DPR lainnya yang baru dilantik.

Dari segi komposisi, 575 anggota DPR periode 2019–2024 yang baru dilantik itu terdiri dari 9 fraksi. Fraksi PDI Perjuangan menempati kursi terbanyak sebanyak 128 kursi, kemudian berturut-turut Fraksi Partai Golkar mendapatkan 85 kursi, Fraksi Partai Gerindra 78 kursi, Fraksi Partai Nasdem 59 kursi, Fraksi PKB 58 kursi, Fraksi Partai Demokrat 54 kursi, Fraksi PKS 50 kursi, Fraksi PAN 44 kursi, dan Fraksi PPP 19 kursi. Dari segi pengalaman di parlemen, 56% dari 575 anggota Dewan terpilih periode 2019–2024 merupakan petahana.

Dalam pidato pertamanya sebagai ketua DPR, Puan mengajak seluruh anggota Dewan untuk kerja keras, kerja cerdas, dan berdedikasi yang tinggi dalam menjalankan fungsi dan peran DPR yang dapat memenuhi aspirasi dan harapan rakyat. Sesuai konstusi, fungsi DPR itu adalah legislasi, anggaran, pengawasan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Sejarah yang kelak akan membuktikan apakah DPR Periode 2019–2024 bisa meningkatkan kinerjanya menjadi parlemen yang memenuhi harapan rakyat. Yang pasti, kami di Fraksi PDI Perjuangan menyambut ajakan ketua DPR untuk kerja keras dan cerdas tersebut. Fraksi-fraksi lain pasti mempunyai semangat yang sama. *

PENULIS ADALAH ANGGOTA DPR RI DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN